

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
KETAHANAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  
OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh  
JENNISYA INDRIVIANKA  
2116041051**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
KETAHANAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  
OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**Oleh**

**JENNISYA INDRIVIANKA**

**Skripsi**

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**JENNISYA INDRIVIANKA**

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial penting untuk memperkuat ketahanan sosial dan mencegah potensi konflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan implementasi program serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci (pejabat Kesbangpol, FKUB, dan Polresta), dokumentasi, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan dengan dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi komunikasi, dan sinergi antarlembaga. Faktor pendukung meliputi komitmen tinggi pejabat pelaksana, dukungan masyarakat, pemanfaatan data potensi konflik, serta adaptasi terhadap tantangan sosial. Namun, terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan dan ketimpangan alokasi sumber dana, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) formal, serta koordinasi hirarki antarlembaga yang belum optimal. Kesimpulan penelitian adalah program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung telah berkontribusi dalam mencegah konflik sosial, meskipun belum optimal.

**Kata Kunci: Implementasi Program, Pembinaan, Pengembangan, Pencegahan, Konflik Sosial, Badan Kesbangpol.**

## ***ABSTRACT***

### ***IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESILIENCE GUIDANCE AND DEVELOPMENT PROGRAM IN PREVENTING SOCIAL CONFLICT BY THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY***

***By***

**JENNISYA INDRIVIANKA**

*The social resilience development and coaching program is crucial for strengthening social resilience and preventing potential conflicts, as stipulated in Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management. The objective of this study is to describe the program's implementation and identify its supporting and inhibiting factors. This study employed a descriptive qualitative method with the policy implementation theory approach of Mazmanian and Sabatier (1983). Data collection techniques included in-depth interviews with key informants (officials from the National Unity Agency (Kesbangpol), the Community Empowerment Forum (FKUB), and the City Police (Polresta), documentation, and source triangulation to ensure data validity. The results indicate that program implementation has been running smoothly with regulatory support, the use of communication technology, and inter-agency synergy. Supporting factors include the high commitment of implementing officials, community support, the use of conflict potential data, and adaptation to social challenges. However, inhibiting factors include limited and unequal allocation of funding sources, the absence of formal Standard Operating Procedures (SOPs), and suboptimal inter-agency hierarchical coordination. The study concludes that the social resilience development and coaching program by the Bandar Lampung City Kesbangpol has contributed to preventing social conflict, although not optimally.*

***Keywords: Program Implementation, Guidance, Development, Prevention, Social Conflict, Kesbangpol Agency.***

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PROGRAM  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
KETAHANAN SOSIAL DALAM  
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  
OLEH BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANDAR  
LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Jennisyah Indriyanka

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116041051

Program Studi

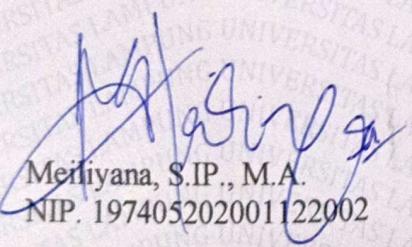
: Ilmu Administrasi Negara

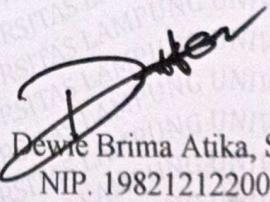
Fakultas

: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

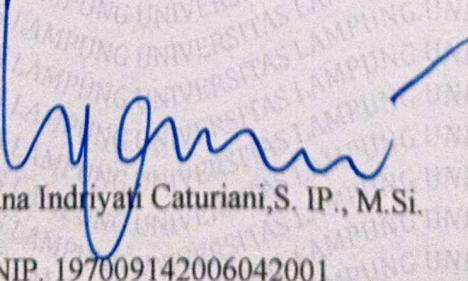


1. Komisi Pembimbing

  
Meiliyana, S.I.P., M.A.  
NIP. 197405202001122002

  
Dewi Brima Atika, S.I.P., M.Si.  
NIP. 198212122008012017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Susana Indriyani Caturiani, S.I.P., M.Si.

NIP. 197009142006042001

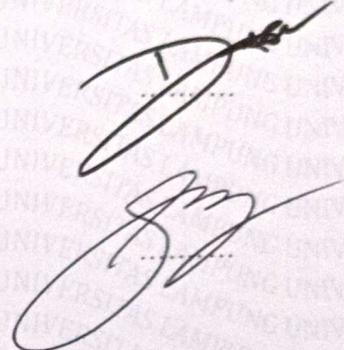
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.**

### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., S.Sos., M.Si.**

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 November 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 November 2025  
Yang membuat pernyataan,



Jennisya Indriyanka  
NPM. 2116041051

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jennisyah Indrivianka, lahir di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 4 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan (Alm) Bapak Hendriyatna dan Ibu Diah Sulistiawati. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Permata, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarame. Setelah menamatkan pendidikan dasar, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung.

Melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai anggota bidang Hubungan Luar (Hublu) pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) serta anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) *Social Political English Community* (SPEC) Universitas Lampung.

Selanjutnya pada bulan Januari hingga Februari 2024 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, penulis juga telah menyelesaikan program magang selama enam bulan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, yang memberikan pengalaman praktis sekaligus memperluas wawasan penulis.

## **MOTTO**

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung"  
**(QS. Ali 'Imran: 173).**

"Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan"  
**(QS. Al-Insyirah: 5-6).**

*“Believe in yourself, you can do anything.”*  
**(Jennisya Indrivianka)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

### **Keluarga tercinta,**

Terima kasih atas segala dukungan, baik moril maupun materil, serta kasih sayang tulus yang tidak pernah berhenti diberikan. Doa, nasihat, motivasi, dan semangat yang Papa dan Mama berikan menjadi kekuatan besar bagi saya hingga dapat mencapai tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kasih sayang-Nya kepada Papa, Mama, Kakak dan adik, sehingga kelak saya dapat membalas segala kebaikan dan membahagiakan kalian.

### **Kepada para Pendidik dan Staf Akademika,**

Terima kasih atas dedikasi, ketulusan, dan kerja keras dalam membimbing selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

### **Almamater tercinta,**

Tempat saya menempuh pendidikan S1, menemukan teman-teman yang telah menjadi layaknya keluarga sendiri, serta menjadi ruang saya bertumbuh dalam ilmu dan pengalaman. Terima kasih atas setiap kesempatan, bimbingan, dan kebersamaan yang berarti.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menyusun skripsi ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Meiliyana, S. IP., M.A. Selaku dosen pembimbing utama sekaligus dosen pembimbing akademik. Kepada Ibu Meiliyana, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, masukan, dan arahan yang telah diberikan selama proses bimbingan skripsi. Terima kasih pula atas waktu yang diluangkan untuk membimbing penulis di tengah padatnya jadwal Ibu. Ibu Meiliyana tidak hanya membantu penulis untuk memperbaiki skripsi, tetapi juga membantu penulis mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis. Setiap diskusi dengan Ibu selalu menambah wawasan dan perspektif baru, yang mendorong penulis untuk terus berkembang dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Segala bimbingan, bantuan, dan dukungan yang Ibu berikan sangat berarti bagi penulis, dan menjadikan Ibu sebagai sosok pembimbing terbaik bagi penulis. Sekali lagi, terima kasih Ibu Meli.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Setiap arahan dan bimbingan yang

Ibu berikan sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih Ibu selalu memberikan motivasi ketika penulis menghadapi kesulitan. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.

3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu juga memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Segenap dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan berdoa semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan keberkahan untuk Bapak dan Ibu semua.
7. Staf Jurusan Administrasi Negara. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas segala bantuan, kesabaran, dan arahannya dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi. Semoga ketulusan dan kesabaran dalam membantu mahasiswa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
8. Seluruh stakeholder yang terlibat dalam penelitian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, Staf FKUB Kota Bandar Lampung, Pihak Kepolisian Polresta Kota Bandar Lampung). Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga demi kelancaran penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan dalam berbagi informasi dan pengalaman sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang

komprehensif dan akurat. Tanpa dukungan dan partisipasi para informan, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

9. Mama dan (Alm) Papa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan buah dari jerih payah, doa, dan perjuangan Mama serta (Alm) Papa. Semoga di masa mendatang penulis dapat membalas segala kebaikan dan pengorbanan tersebut dengan menjadi pribadi yang lebih baik, berbakti kepada orang tua, serta menjadi kebanggaan yang selalu kalian harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Mama serta menempatkan (Alm) Papa di tempat terbaik di sisi-Nya.
10. Kepada Mba Dini, dan ketiga adikku: Chira, Sava, dan Syifa. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala doa, dukungan, serta semangat yang telah kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi sumber motivasi yang berharga bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan setiap tahap dengan penuh kesabaran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesuksesan, keberkahan dan kebahagiaan bagi kalian.
11. Alan. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Alan, yang selalu menemani baik ketika senang maupun sedih. Terima kasih atas segala dukungan yang begitu berarti bagi penulis. Terima kasih atas segala kesabaran dan perhatian yang tidak pernah putus, serta dorongan positif yang selalu menguatkan penulis untuk terus melanjutkan menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis sangat menghargai segala bentuk pengertian dan kehadiran yang memberikan ketenangan serta semangat baru di setiap proses yang dijalani. Penulis mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai dalam setiap langkah Alan di masa depan.

12. Kepada SIATER'S. (Zahfira, Tania, Widya, Nurma, Teda) penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk sahabat-sahabat terbaik penulis. Terima kasih atas segala dukungan positif, doa, serta kehadiran kalian dalam hidup penulis. Terima kasih selalu hadir untuk saling berbagi keceriaan. Terima kasih atas segala tawa, canda, dan kehangatan persahabatan yang kalian berikan. Penulis akan sangat merindukan setiap momen yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesuksesan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kalian semua.
13. Syifa Melandri. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Cipa atas kehadiran yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih Cipa telah membantu dan memberikan motivasi serta dorongan dalam proses penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah bersedia menemani penulis selama proses bimbingan skripsi. Terima kasih Cipa telah membantu penulis saat mengalami kesulitan serta bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis. Semoga Allah SWT memberikan Cipa kebahagiaan, kesuksesan, serta dilancarkan segala urusannya.
14. Dea Amanda Tiara. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Dea atas kehadirannya dalam hidup penulis. Terima kasih, Dea, karena telah memberikan motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Segala bentuk bantuan dan dukungan sangat berharga bagi penulis. Semoga Dea dimudahkan segala urusan, diberikan kesuksesan dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Dea berlipat ganda.
15. Tamara Putri Pasaribu. Terima kasih kepada Ara, atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan perhatian Ara tidak akan terlupa dan akan sangat menjadi memori berharga bagi penulis. Terima kasih telah menemani penulis saat proses penelitian skripsi. Semoga Ara dilancarkan proses skripsinya serta kesuksesan selalu menyertai dalam setiap langkah hidup Ara.

16. Kepada Syaza, Yuke, Nur Annisa, Naomi, Andly Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, dan semangat yang kalian berikan. Terimakasih telah membantu dan menemani penulis dalam menjalani kesulitan dimasa perkuliahan yang telah dilewati. Semoga segala keinginan dan tujuan kalian akan selalu diterangkan dan dipermudah oleh Allah SWT.
17. Auzellya Izma Salsabilla. Kepada sahabat magang penulis, Ojel, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, kebaikan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama menjalani masa magang. Terima kasih atas setiap momen berharga yang penuh canda tawa dan keceriaan, yang menjadikan pengalaman magang terasa menyenangkan dan tak terlupakan. Penulis sangat menghargai setiap perhatian dan semangat yang Ojel berikan selama proses tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan rezeki, serta memberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah yang Ojel tempuh ke depannya.
18. Kepada teman-teman KKN Desa Tri Rejo Mulyo. Penulis mengucapkan terima kasih atas pengalaman dalam bentuk kerjasama di setiap program kerjanya yaitu kepada Kadek, Wulan, Nurul, Arumbi, Malik, dan Izzu. Semoga segala keinginan dan tujuan kalian akan selalu diterangkan dan dipermudah oleh Allah SWT.
19. Sebagai penutup, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah tetap kuat menghadapi segala tantangan, lelah, dan keraguan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika segalanya terasa sulit dan melelahkan. Setiap proses yang dilalui telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih sabar, tegar, dan menghargai setiap usaha sekecil apa pun. Penulis bersyukur atas kekuatan dan keberanian yang tumbuh dari dalam diri untuk terus melangkah hingga akhirnya tiba di titik ini. Semoga diri ini tidak berhenti untuk belajar, terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih

baik, dan senantiasa mengingat bahwa setiap pencapaian adalah hasil dari ketekunan, doa, dan keyakinan pada diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap bidang ilmu administrasi negara.

Bandar Lampung, 26 November 2025

Penulis

**Jennisya Indrivianka**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	ix
2.2 Tinjauan Teoritis Kebijakan Publik .....	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2.2.2 Proses Kebijakan Publik .....	12
2.3 Tinjauan Teoritis Tentang Implementasi Program .....	15
2.3.1 Pengertian Implementasi .....	15
2.3.2 Konsep Implementasi Program .....	17
2.3.3 Model-Model Implementasi Program .....	18
2.4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya .....	24
2.5 Konflik Sosial .....	26
2.5.1 Faktor-Faktor yang Penyebab Konflik Sosial .....	27
2.5.2 Pencegahan Konflik Sosial .....	28
2.6 Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	34
3.2 Fokus Penelitian .....	34

3.3 Lokasi Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5.1 Wawancara .....	37
3.5.3 Dokumentasi .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	39
3.6.1 Kondensasi Data .....	41
3.6.2 Penyajian Data .....	41
3.6.3 Penarikan Kesimpulan .....	42
3.7 Teknik Validasi/Keabsahan Data .....	42
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1 Profil dan Gambaran Singkat Kota Bandar Lampung .....	45
4.1.2 Profil & Gambaran Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung .....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.2.1 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan .....	61
4.2.2 Kemampuan Kebijakan untuk Menstruktur Proses Implementasi ..	71
4.2.3 Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi	87
4.3 Pembahasan Penelitian .....	97
4.3.1 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan .....	97
4.3.2 Kemampuan Kebijakan untuk Menstruktur Proses Implementasi ..	101
4.3.3 Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi ..	108
4.3.4 Faktor Pendukung Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung .....	112
4.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung .....	114
<b>V. KESIMPULAN .....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan .....	115
5.2 Saran .....	117

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
-----------------------------	------------

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Daftar 10 Kota Dengan Skor Toleransi Terendah IKT 2024 .....	5
Tabel 2. Data Kasus Intoleransi 4 Tahun Terakhir .....	5
Tabel 3. Matriks Penelitian Terdahulu .....	ix
Tabel 4. Data Narasumber Yang Terlibat Dalam Penelitian .....	38
Tabel 5. Daftar Dokumentasi .....	39
Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan Tahun 2024 .....	47
Tabel 7. Banyaknya Tempat Ibadah di Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan, 2024 .....	49
Tabel 9. Laporan Kegiatan FKUB Kota Bandar Lampung, 2024 .....	66
Tabel 10. Laporan Kegiatan FKUB Berkaitan dengan Mediasi Mengenai Permasalahan Gereja Kristus di Indonesia (GKDI) .....	76
Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Tahun 2023 .....	77
Tabel 12. Tim Pelaksana Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan ORMAS Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, 2025 .....	82
Tabel 13. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pada Kegiatan P4GN dan FN 2025 ....	84

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Enam Tertinggi Bentuk Tindakan Aktor Non Negara .....	4
Gambar 2. Proses atau Alur Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) .....	22
Gambar 3. Model Kesesuaian Implementasi Program Menurut Korten (1998) ....	23
Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir .....	33
Gambar 5. Komponen-Komponen Analisis Data .....	40
Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung .....	54
Gambar 7. Media Sosial Instagram Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung ..	64
Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Frekursor Narkotika (P4GN dan FN) .....	68
Gambar 9. Dokumen KAK Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung pada Progam Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya .....	73
Gambar 10. SOP Kegiatan FKUB Pada Proses Penertiban Pendirian Rumah Ibadah .....	81
Gambar 11. Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Kegiatan FKUB Kota Bandar Lampung 2025 .....	86
Gambar 12. Peta Potensi Konflik Sosial Bandar Lampung .....	90
Gambar 13. Kegiatan Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Sosialisasi, dan Dialog Lintas Agama .....	93
Gambar 14. Kegiatan Sosialisasi P4GN dan FN Kepada Pelajar di Kota Bandar Lampung .....	94

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Masalah**

Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan, solidaritas, dan kohesi di tengah perubahan, keragaman, dan kemungkinan konflik. Hal ini merupakan komponen penting dari ketahanan nasional sebagai landasan untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara (Handrisal, 2019). Ketahanan sosial dalam suatu masyarakat meliputi empat dimensi yaitu, mampu melindungi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dari perubahan sosial. Keberagaman suku dan etnis yang dimiliki oleh masyarakat sebenarnya merupakan tantangan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan krisis sosial yang akan berdampak pada rusaknya tatanan sosial. Ketahanan di bidang sosial penting untuk membentuk stabilitas kehidupan masyarakat, terutama di tengah dinamika globalisasi, dan meningkatnya kompleksitas persoalan sosial.

Salah satu bentuk persoalan sosial yang kerap muncul adalah konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, merupakan fenomena yang sering kali mengarah pada kekerasan sosial yang menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Menurut Niniek dan Yusniati dalam Wahyuni (2018), konflik muncul dari adanya kekuatan yang saling bertentangan.

Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pencegahan konflik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada aspek Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengawasi stabilitas sosial politik di daerah. Badan Kesbangpol bertugas untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik salah satunya melalui program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial yang dibentuk sejak tahun 2016. Program ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, ORMAS yang dibentuk berdasarkan kebijakan dari kepala Badan Kesbangpol (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

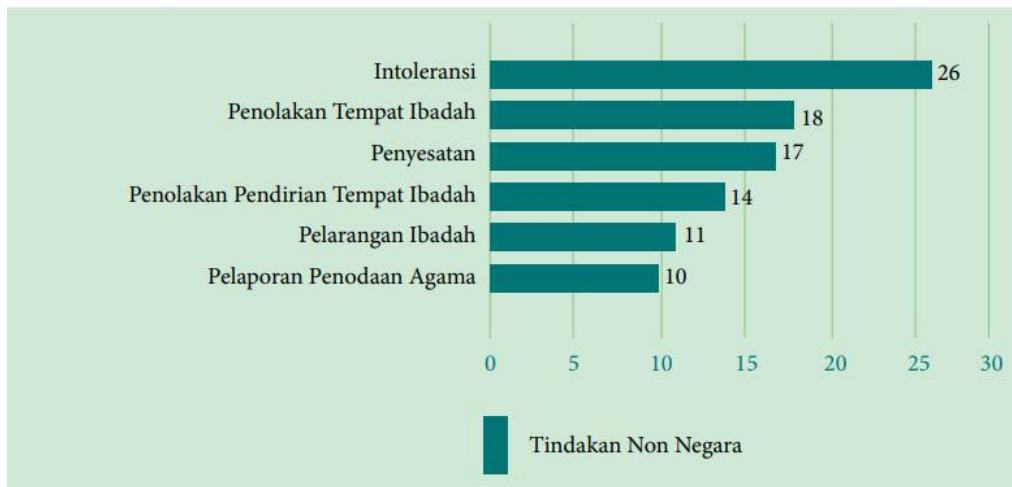
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial merupakan langkah preventif untuk mencegah konflik sosial. Upaya untuk memperbaiki, memperkuat, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas program tersebut di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung perlu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang memiliki tiga komponen utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik (Sintaresmi *et al.*, 2022). Kemudian pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2022). Perda ini secara tidak langsung berkaitan dengan pencegahan konflik sosial salah satunya melalui program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial.

Melihat potret permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung yang dikenal sebagai kota multietnis dan multikultural seringkali pada kenyataannya masih banyak persoalan sosial. Konflik di Kota Bandar Lampung tidak terbatas pada satu bentuk saja. Sebagai Kota urban yang terus berkembang, Bandar

Lampung juga menghadapi beragam konflik sosial, seperti konflik agraria, sengketa tanah, kekerasan berbasis gender, perburuhan, advokasi kebijakan, hingga kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, tercatat sebanyak 61 pengaduan kasus sepanjang tahun 2023 yang terdokumentasi melalui Sistem Pendokumentasian Kasus (SIMPENSUS). Aduan tersebut mencakup lima isu utama, yaitu: perburuhan (23,3%), agraria (20%), kekerasan berbasis gender (16,7%), advokasi kebijakan (10%), dan kekerasan terhadap anak (6,7%). Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung melaporkan adanya 75 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024.

Data di atas menunjukkan terdapat banyak konflik sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung, akan tetapi salah satu konflik sosial yang kurang diperhatikan adalah persoalan intoleransi. Penanganan terhadap konflik intoleransi masih minim dilakukan dan menjadi sangat krusial karena intoleransi dapat menjadi pemicu (*trigger conflict*) munculnya berbagai bentuk konflik sosial lainnya. Padahal sikap toleransi memegang peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa karena sikap saling menghormati dan tidak mendiskriminasikan perbedaan merupakan kunci terciptanya harmoni dalam masyarakat.

Dibuktikan dari data SETARA *Institute* sepanjang tahun 2023 mencatat terdapat enam tindakan peristiwa konflik sosial dalam kategori kelompok terbanyak yang dilakukan oleh aktor non-negara di Indonesia. Berikut disajikan tabel data enam tindakan peristiwa konflik sosial tertinggi bentuk tindakan non-negara:



**Gambar 1. Enam Tertinggi Bentuk Tindakan Aktor Non Negara**

*Sumber: SETARA Institute, 2023*

Berdasarkan data diatas menunjukkan tindakan konflik sosial non-negara tertinggi di Indonesia, yaitu intoleransi, yang dimana menjadi tantangan serius dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Analisis terhadap data diatas menunjukkan bahwa intoleransi merupakan masalah yang mendesak, dengan tingginya angka intoleransi oleh masyarakat dalam 26 tindakan tercatat. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan sosial dan kurangnya toleransi antar kelompok masyarakat di Indonesia.

Ketegangan sosial dan kurangnya toleransi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola keragaman penduduk, yang dianggap sebagai salah satu parameter dalam mengukur tingkat toleransi di Kota Bandar Lampung. Keragaman pada sebuah kota diasumsikan dapat memengaruhi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota. Hasil skor indeks kota toleran 2024 untuk 10 (sepuluh) kota skor toleransi terendah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar 10 Kota Dengan Skor Toleransi Terendah IKT 2024**

No	Nama Kota	Skor Akhir
1.	Pagar Alam	4,381
2.	Sabang	4,377
3.	Ternate	4,370
4.	Makassar	4,363
5.	Bandar Lampung	4,357
6.	Pekanbaru	4,320
7.	Banda Aceh	4,202
8.	Lhokseumawe	4,140
9.	Cilegon	4,994
10.	Pare Pare	4,945

*Sumber: SETARA Institute, 2024*

Dari data diatas Kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke lima dalam skor toleransi terendah, terjadinya konflik antar kelompok masyarakat meningkat, yaitu, ketegangan antar agama atau antar suku yang memanas. Kota yang dikenal memiliki toleransi rendah dapat dianggap tidak ramah atau tidak inklusif oleh wisatawan atau investor, sehingga berpotensi memengaruhi perekonomian atau citra kota secara keseluruhan. Konflik intoleransi di Kota Bandar Lampung sangat mendesak untuk diteliti karena konflik intoleransi dapat menyebabkan kerusakan pada ketahanan sosial dan politik di Kota Bandar Lampung. Lebih lanjut, data Pemerintah Kota Bandar Lampung, jumlah kasus konflik sosial di kota tersebut makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Kasus Intoleransi 4 Tahun Terakhir**

No	Kasus Konflik Sosial	Intoleransi	Tahun
1.	150	30	2020
2.	180	40	2021
3.	160	35	2022
4.	200	50	2023

*Sumber: Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2023*

Fenomena konflik sosial berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa terjadinya konflik sosial di Kota Bandar Lampung terkhusus intoleransi masih belum stabil dan terkadang mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu antara 10-15 kasus.

Salah satu contoh kasus terbaru mengenai intoleransi adalah pembangunan tugu pagoda di wilayah teluk betung selatan Kota Bandar Lampung. Dalam sebuah artikel yang diunggah oleh Lampungpro.co, 2024, pembangunan Tugu Pagoda di Teluk Betung mencerminkan upaya pemerintah kota untuk menciptakan ikon multikultural dan memperkuat pariwisata. Namun, kurangnya konsultasi publik dan minimnya representasi budaya lokal memicu resistensi dari masyarakat adat dan elemen sosial (Amiruddin dalam artikel Lampungpro.co, 2024).

Dari fenomena di atas mencerminkan bahwa adanya potensi konflik sosial intoleransi tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan, tapi dalam bentuk penolakan simbolik, dan aksi protes. Kasus pembangunan Tugu Pagoda mencerminkan lemahnya implementasi prinsip inklusivitas, partisipasi publik, dan kepekaan budaya dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam masyarakat multikultural, kebijakan yang tidak memperhatikan keseimbangan representasi budaya berpotensi menimbulkan persoalan intoleransi dan memperburuk situasi sehingga dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa serta mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa.

Melihat permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis berkaitan dengan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial di Bandar Lampung. Berdasarkan riset yang telah dilakukan peneliti pada hari Kamis, 13 Februari 2025, terdapat pernyataan dari staff bidang pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, yang menilai bahwa implementasi program sering kali menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial. Menyikapi permasalahan tersebut, Badan Kesbangpol belum mengambil

langkah penanganan yang konkret. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik yang dilakukan Badan Kesbangpol yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi program yang melibatkan pembinaan nilai-nilai kerukunan dan toleransi guna mencegah ketegangan sosial yang berpotensi memicu konflik sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh deskripsi dan analisa mendalam mengenai Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

2. Teridentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur dengan mengimplementasikan teori kebijakan dalam mencegah potensi konflik sosial melalui pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya dan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam mencegah konflik. Kemudian dengan menganalisis pelaksanaan program pembinaan ketahanan sosial, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program tersebut, sehingga Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dapat melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik dimasa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dengan demikian penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengulas penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang mirip dengan judul penelitian penulis. Namun demikian, penulis telah mengutip sejumlah penelitian sebagai referensi untuk memperkaya data penelitian dalam penelitian penulis. Berikut ini disajikan penelitian terdahulu sebagai beberapa ulasan terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 3. Matriks Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alan Aska Nicola, (2023) Peran badan kesatuan bangsa dan politik provinsi lampung dalam implementasi program lampung merawat indonesia tahun 2023.	Penelitian ini menggunakan teori Peran menurut Gede Diva (2009) terdiri dari peran fasilitator, peran regulator, dan peran katalisator.	Dalam penelitian ini, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dikaji dari segi fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, Kesbangpol menjembatani berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah dalam membangun dialog terkait kesatuan bangsa. Sebagai regulator, Kesbangpol menyusun aturan dan kebijakan terkait ketahanan sosial dan politik. Sedangkan peran katalisator diwujudkan melalui inisiatif program yang memfasilitasi kerjasama antar-pihak.

---

2.	Shela, (2022) Strategi Pembinaan Dalam Pencegahan Konflik Oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung Terhadap Organisasi Kemasyarakatan.	Penelitian ini menggunakan teori dari Mangunhardjana (1986:17) tentang pembinaan melalui dua Pendekatan, yaitu arti dan metode	Penelitian ini membahas tujuan pembinaan yang dilakukan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dalam mencegah konflik antar-organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembinaan bertujuan menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik melalui penguatan kapasitas organisasi, edukasi, dan dialog antar-ormas.
----	---	--	--

---

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024*

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan pada metode penelitian yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif serta fokus utama pada penelitian ini yaitu implementasi program. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada penelitian terdahulu yang membuat penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan. Pertama, penelitian terdahulu lebih fokus pada peran, pelayanan, dan penelitian terhadap program lain dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetapi belum ada yang meneliti mengenai program ketahanan sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara spesifik. Kedua, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan sosial berdasarkan pencegahan konflik sosial serta menggunakan teori milik Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu mudah atau tidaknya masalah yang dihadapi, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, variabel-variabel di luar UU yang mempengaruhi implementasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada penelitian terdahulu dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi program

pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial.

## **2.2 Tinjauan Teoritis Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye dalam Wahyuni, (2017) “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memutuskan tindakan apa yang sebaiknya dilaksanakan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang muncul dan keberhasilan yang ingin dicapai dari tindakan tersebut. Sementara itu, Anderson yang dikutip oleh Young dan Quinn, dalam Suharto (2005) menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi). Eyestone (1971) menjelaskan bahwa kebijakan adalah hubungan antara suatu lembaga pemerintah dengan lingkungannya (hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan pemerintah). Hubungan antar berbagai bagian dalam suatu instansi pemerintah merupakan suatu bentuk politik yang muncul dari atas ke bawah. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahannya, baik secara organisasi maupun individu. Kebijakan ini berupa korelasi antar unsur lembaga dan lembaga.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang terarah, sadar, dan terukur yang melibatkan para pihak yang berkepentingan

dalam bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan diperlukan agar kebijakan publik berfungsi dengan baik. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang definisi kebijakan publik, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, atau tindakan yang dimaksudkan untuk melaksanakan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### **2.2.2 Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah sebagai berikut:

#### **1. Penentuan Agenda**

Yang dimaksud dengan “agenda” dalam kebijakan publik antara lain adalah daftar persoalan atau permasalahan pejabat pemerintah dan orang di luar pemerintah yang berkaitan dengan pejabat pemerintah. Banyak pakar kebijakan publik yang telah menyatakan pendapat dan model mereka mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan agenda seharusnya berjalan. Tujuannya untuk menjelaskan mekanisme dan dinamika perubahan kondisi sosial menjadi permasalahan politik yang harus diselesaikan dengan menggunakan kekuasaan negara untuk merumuskan suatu kebijakan publik.

#### **2. Perumusan Alternatif Kebijakan**

Perumusan kebijakan merupakan proses perumusan pilihan atau alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

#### **3. Adopsi Kebijakan**

Alternatif kebijakan yang disetujui oleh mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

#### 4. Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

#### 5. Penilaian atau evaluasi kebijakan

Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan.

William N. Dunn memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami proses kebijakan publik, menekankan pentingnya analisis yang sistematis, partisipasi pemangku kepentingan, dan konteks sosial-politik. Proses ini bersifat dinamis dan literatif, di mana setiap tahap saling mempengaruhi dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Pendekatan ini membantu pembuat kebijakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Dye (1978), proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

##### 1. Identifikasi masalah kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

##### 2. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas

keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

### 3. Perumusan Kebijakan

Tahapan pengusulan kebijakan melalui penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

### 4. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan lembaga legislatif.

### 5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

### 6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik). Proses kebijakan sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan di evaluasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan Dye membantu membuat kebijakan untuk memahami dinamika yang mempengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan, serta pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

Sedangkan menurut Suryadi (dalam Fatkuroji, 2016), mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari (1) Penyusunan agenda, (2) Formulasi kebijakan, (3) Adopsi kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, dan (5) Penilaian

kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa proses implementasi terdiri dari formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Ketiga pendekatan ini memberikan wawasan yang berharga tentang proses kebijakan publik, meskipun dengan fokus dan penekanan yang berbeda. Dunn menawarkan model yang lebih analitis dan komprehensif, Dye menekankan pentingnya agenda setting dan kekuatan politik, sementara Pasolong menyoroti konteks sosial dan interaksi antar pemangku kepentingan. Memahami perbedaan dan kesamaan ini dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **2.3 Tinjauan Teoritis Tentang Implementasi Program**

#### **2.3.1 Pengertian Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Webster Dictionary yang dikutip oleh Syahida (2014) yaitu Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan.”

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002), bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pendapat selanjutnya menurut Dunn dalam Tjilen (2019), implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk melaksanakan kebijakan, biasanya berisi implementasi berbagai program dan didalamnya sering terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks dan memerlukan tindakan bersama. Kemudian implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Pasaribu (2021), merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan suatu program dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses penerapan dari program yang telah dirancang sebelumnya yang selanjutnya diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan dibuat setelah adanya kebijakan. Implementasi kebijakan publik menurut peneliti berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas yaitu tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang di dalamnya terdapat para pelaksana kebijakan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan kebijakan.

### 2.3.2 Konsep Implementasi Program

Program merupakan elemen pertama yang harus ada untuk menyelesaikan kegiatan implementasi. Kemudian unsur kedua yang harus dipenuhi pada proses pelaksanaan program yaitu keberadaan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap hasil program yang dilaksanakan, sehingga dapat memberikan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan. Program tersebut dapat dikatakan tidak bisa terlaksana jika tidak membawa manfaat apa pun bagi masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan program yang efektif, pemerintah harus mengambil langkah-langkah berupa pengumpulan sumber daya keuangan, pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil dari tindakan pertama disebut masukan kebijakan, sedangkan tindakan kedua disebut proses implementasi kebijakan Ratmiko dalam Alif (2024). Implementasi kebijakan juga merupakan suatu pelaksanaan kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2017). Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

### **2.3.3 Model-Model Implementasi Program**

Model merupakan representasi simbolik atau perwakilan dari suatu benda, proses system, atau gagasan. Model dapat berbentuk gambar-gambar grafis, verbal atau matematikal. Jadi model merupakan perwujudan dari suatu teori (Maranda, 2018).

Kemudian implementasi program menurut Jones dalam Agustino (2017), merupakan salah satu bagian dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan program adalah usaha yang sah untuk mencapai tujuan. Menurut Jones, berjalannya program didukung oleh tiga bidang kegiatan utama yaitu:

1. Pengorganisasian struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau aplikasi perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Selanjutnya unsur-unsur Implementasi kebijakan publik menurut pandangan dari Mazmanian and Sabatier dalam Agustino (2017) dipengaruhi oleh tiga indikator yakni:

1. Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan meliputi;
  - a) Dukungan regulasi dan media sosial, dukungan aturan dan media sosial ialah melihat bagaimana permasalahan yang terjadi, apakah termasuk permasalahan yang didukung oleh

aturan kebijakan atau termasuk kedalam kategori permasalahan yang tidak didukung oleh aturan kebijakan.

- b) Keberagaman perilaku kelompok sasaran, semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas serta semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.
  - c) Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan.
2. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi;
- a) Kejelasan dan konsistensi tujuan, semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas maka skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya juga akan semakin terarah.
  - b) Koordinasi dan responsibilitas, dalam penelitian atau analisis sosial, teori ini membantu memahami bagaimana suatu faktor (sebab) dapat memengaruhi atau menghasilkan suatu kondisi tertentu (akibat).
  - c) Ketetapan alokasi sumberdana, tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

- d) Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana, didalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hiearki badan-badan pelaksana.
  - e) Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik veto dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat memengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
  - f) Perekutan Pejabat Pelaksana, Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam UU, para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, karena *top-down policy* tidak mudah untuk diimplementasikan pada para pejabat pelaksana di level lokal.
  - g) Keterbukaan kepada pihak luar, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.
3. Variabel-variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain:

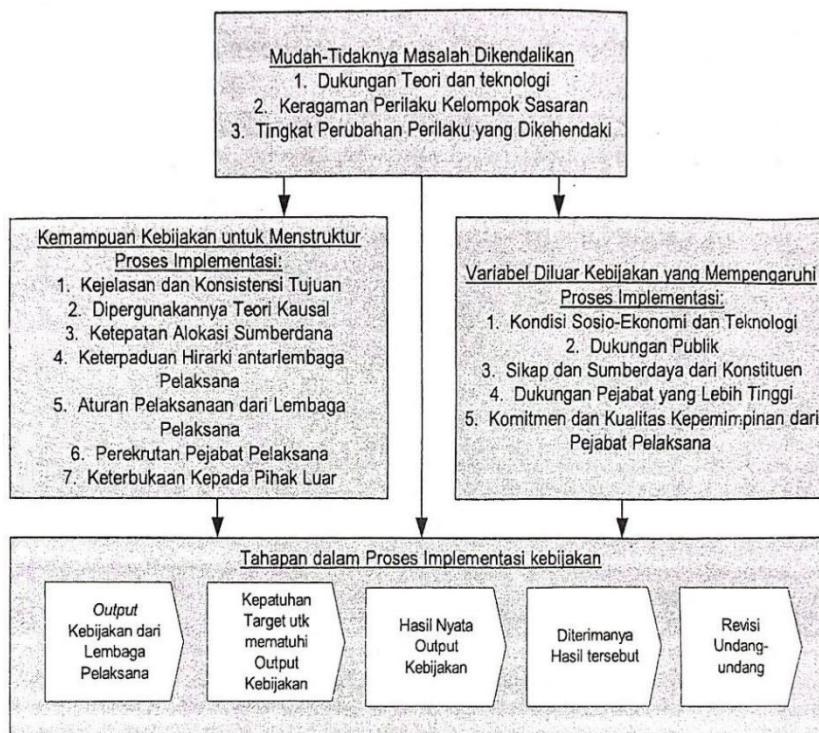
- a) Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi  
Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya

pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.

b) Dukungan publik

Hakikat perhatian publik bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga.

- c) Sikap dan sumberdaya dari konstituen, merupakan perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.
- d) Dukungan pejabat yang lebih tinggi, Dukungan Pejabat yang lebih tinggi sangat berpengaruh bagi pelaksanaan kebijakan implementasi.
- e) Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan UU untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya.



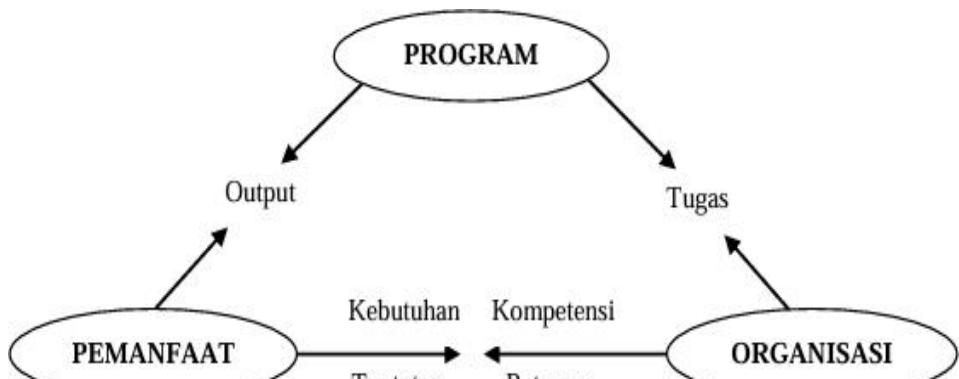
**Gambar 2. Proses atau Alur Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)**

*Sumber: Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2017)*

Kemudian dalam implementasi program, ada kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Akib dan Tarigan (2008) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Implementasi program tetap harus sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Untuk itu Korten (1988), menyampaikan model kesesuaian implementasi program dengan digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3. Model Kesesuaian Implementasi Program Menurut Korten (1998)**

*Sumber: Korten dalam Tarigan (2008)*

Penggambaran model oleh Korten ini berintikan tiga elemen yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan dengan program kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi untuk memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yg dikembangkan Korten, bisa dipahami bahwa kinerja program akan berhasil jika menggunakan kesesuaian antara tiga unsur implementasi. Hal ini ditimbulkan jika hasil program sesuai

menggunakan kebutuhan kelompok sasaran, kentara hasil bisa dimanfaatkan apabila organisasi pelaksana program mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang merupakan salah satu model *top down*. Model Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2017), biasa disebut dengan Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Adapun alasan penulis dalam menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier karena teori ini salah satu model pendekatan *top down*, dimana model pendekatan ini memiliki pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah yaitu pemerintahlah yang berkuasa menjadi pembuat keputusan yang bertugas sebagai aktor kunci dalam proses. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandar Lampung harus dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan benar untuk dapat dan mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Selain itu teori ini dianggap sangat tepat untuk menganalisis proses implementasi. Dan juga teori ini dianggap paling mendekati dengan masalah yang dipaparkan karena mampu menganalisis masalah yang sedang diteliti.

#### **2.4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Pembinaan dan pengembangan adalah dua konsep penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, baik dalam konteks organisasi maupun pendidikan. Pembinaan berfokus pada peningkatan keterampilan dan sikap dalam jangka pendek, sementara pengembangan berorientasi pada pertumbuhan karier dan peningkatan potensi jangka panjang. Keduanya memiliki peran penting dalam

meningkatkan kinerja individu dan organisasi, serta dalam membentuk tenaga kerja yang adaptif dan kompeten.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya memiliki indikator utama yaitu persentase terciptanya stabilitas ketahanan sosial seni dan budaya dengan target sebesar 100% dan pencapaian sebesar 87,39% (Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, 2024). *Output* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya kemudian *outcome* laporan hasil Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan (Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, 2024).

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu: Kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, 2024).

Dengan demikian, program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial mengedepankan pelatihan keterampilan sosial dan emosional yang dapat membantu individu dan kelompok masyarakat untuk lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Secara keseluruhan, program pembinaan dan

pengembangan ketahanan sosial harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik dari individu dan kelompok masyarakat.

## 2.5 Konflik Sosial

Beberapa ahli memberikan definisi tentang konflik dari sudut pandang masing-masing. Teori konflik sosial yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat di mengerti sebagai respon dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi dan industrialisasi. Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme structural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx pada tahun 1950-an teori konflik yang semakin mulai merebak. Konflik berasal dari kata kerja latin “*Configere*” yang berarti “saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurnyanya atau membuatnya “tidak berdaya”.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Menurut Budi (2023) berpendapat bahwa konflik adalah sebuah keadaan atau proses yang mana diantara kedua belah pihak berupaya untuk menggagalkan pihak lain saat ingin mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat, nilai-nilai, maupun tuntutan dari masing-masing pihak. Menurut Badeni dalam Putri *et al.*, (2021) menyatakan bahwa tingkat perbedaan kepentingan antar individu dan atau kelompok sangat menentukan seberapa tingkat kemungkinan terjadinya konflik di antara anggota kelompok dan antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pemimpin organisasi perlu menganalisis dengan nyata konflik. Tingkat perbedaan kepentingan antar individu dan atau kelompok sangat menentukan

seberapa tingkat kemungkinan terjadinya konflik. Konflik harus dihindari bahkan dihilangkan karena akan merugikan organisasi.

Konflik muncul karena adanya perbedaan dan keberagaman. Pernyataan tersebut memberikan contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal, yaitu sebagai berikut:

- a) Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar anggota suatu kelompok, misalnya konflik yang berkaitan dengan suku, agama, atau ras, serta konflik antar kelompok.
- b) Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara atau pemerintah. Pada umumnya perselisihan tersebut muncul karena masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

### **2.5.1 Faktor-Faktor yang Penyebab Konflik Sosial**

Coser dalam Susan (2019) membagi sebab konflik menjadi dua tipe atau bentuk dasar konflik yang terdiri tipe realistik dan tipe non realistik. Tipe realistik memiliki sebab konflik yang konkret atau bersifat materiil, seperti perebutan sumber daya ekonomi, alam, maupun wilayah sedangkan tipe non realistik disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat idiosafis atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama, dan kelompok-kelompok sektarian.

Kemudian menurut Robin, Walton, dan Duton dalam Wijono (2012) menjelaskan tentang sumber konflik antarpribadi atau kelompok melalui kondis-kondisi pemula (*antecedent conditions*) yang meliputi: 1) persaingan terhadap sumber-sumber (*competition resources*), 2) ketergantungan terhadap tugas, 3) kekurangan deskripsi tugas (*task interdependence*), 4) masalah status (*status problem*), 5) rintangan komunikasi (*communication barriers*), 6) sifat-sifat individu (*individual traits*).

Sedangkan menurut Suseno dalam Kurniawan (2014), yang melatarbelakangi konflik timbul adalah:

1. Modernisasi dan globalisasi.
2. Akumulasi kebencian dalam masyarakat.
3. Adanya kekerasan.
4. Sistem politik.

Pada dasarnya tidak ada sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan tidak akan ada sebuah pertikaian yang melibatkan masa apabila salah satu kelompok masa tersebut tidak merasakan sebuah tekanan yang begitu berat. Dimana mereka memandang kelompok lain sebagai kelompok beruntung yang kemudian menurut kelompok tersebut adalah sebagai musuh, akibatnya untuk meluapkan tekanan itu adalah pemberontakan berupa kekerasan yang dilakukan secara masa.

Menurut Mangkunegara (2013) menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab konflik yaitu :

1. Koordinasi yang tidak dilakukan
2. Ketergantungan dalam pelaksanaan tugas
3. Tugas yang tidak jelas (tidak ada deskripsi jabatan)
4. Perbedaan dalam orientasi kerja
5. Perbedaan dalam memahami tujuan organisasi
6. Perbedaan persepsi
7. Sistem kompetensi insentif (reward)
8. Strategi pemotivasiyan yang tidak tepat.

### **2.5.2 Pencegahan Konflik Sosial**

Strategi untuk pencegahan konflik merupakan strategi yang sangat penting sehubungan dengan banyaknya potensi konflik dalam masyarakat dan kebijakan yang tidak demokratis. Pada dasarnya, pencegahan konflik merupakan cara untuk mencegah konflik agar tidak bereskalasi menjadi konflik lebih besar. Hal itu mencakup tentang

strategi dari pencegahan potensi konflik atau konflik bersifat laten supaya tidak menjadi konflik terbuka atau konflik kekerasan, pencegahan konflik terbuka agar tidak meningkat menjadi konflik yang lebih besar atau krisis, dan pencegahan agar persetujuan damai yang telah dicapai tidak kembali jatuh dalam situasi peperangan.

Ketika pencegahan konflik dilakukan, maka akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Oleh karenanya, menurut Johan Galtung dalam Makhmudah (2015), untuk menerapkan kondisi yang damai, maka setiap individu dan atau masyarakat harus ada kehendak untuk mewujudkan. Dalam hal ini, tidak hanya untuk mengurangi kekerasan (pengobatan) akan tetapi juga ikhtiar untuk menghindari kekerasan (pencegahan). Karena konflik merupakan sesuatu yang destruktif, merugikan dan membuat manusia kurang beradab. Dalam rangka pencegahan konflik, Jacob Bercovith dan Richard Jackson, menawarkan tiga rangkaian strategi pencegahan konflik. Dalam hal ini, Bercovith dan Jackson (2009), mengklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu;

- a) Tindakan pencegahan untuk menghindari konflik kekerasan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, memprediksi konflik atas dasar mengidentifikasi beberapa kondisi struktural yang umumnya kondusif, menjadi pusat perhatian setiap rangkaian langkah pencegahan konflik. Artinya, pencegahan konflik difokuskan pada upaya mencegah kerusakan yang serius atau pada tingkat yang lebih tinggi dari konflik. Prediksi seperti ini membutuhkan pemahaman penyebab konflik dan mengenali tanda awal apakah konflik tersebut berpotensi merusak atau sebaliknya.
- b) Tindakan membangun kepercayaan membutuhkan peran yang sangat berbeda dari pada peringatan dan respon sistem awal dalam mencegah konflik sosial. Ketidakpastian, kecemasan, ketakutan

timbal balik, dan kesalahan persepsi antara pihak yang bertikai menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan.

Adapula teori pencegahan konflik yang dikemukakan oleh Nicholas dan Mikael dalam Eviany (2019), terdapat dua bentuk pencegahan, yaitu: 1) Pencegahan secara langsung (*direct prevention*) dan 2) Pencegahan struktural (*structural prevention*). Pencegahan juga sudah tertuang dalam dasar hukum undang-undang Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas tentang penanganan konflik sosial. Penanganan tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan untuk memelihara lingkungan yang damai, penghentian adalah strategi menghentikan konflik yang sudah terjadi, dan pemulihan adalah upaya berkelanjutan, terencana dan terukur dengan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi (Kemhan.go.id, 2012).

Secara sederhana, strategi ini lebih meletakkan pada pengurangan eskalasi ketika terjadi ketegangan antara pihak yang bertikai. Ketika para pihak memiliki keyakinan dalam ketegangan masing-masing dan perilaku di masa depan, maka peristiwa yang mungkin dapat memicu munculnya konflik akan bisa dicegah. Sebab, mengurangi dan mengelola sumber-sumber ketegangan antara pihak-pihak dengan mengembangkan hubungan kepercayaan dan keyakinan merupakan syarat penting untuk pencegahan konflik.

## 2.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung, seperti konflik antar kelompok yang memengaruhi stabilitas masyarakat. Situasi ini mendorong perlunya strategi dari Badan Kesbangpol dalam memperkuat ketahanan sosial melalui program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam mencegah konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Kesbangpol dalam

merancang dan mengimplementasikan program tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas pelaksanaannya.

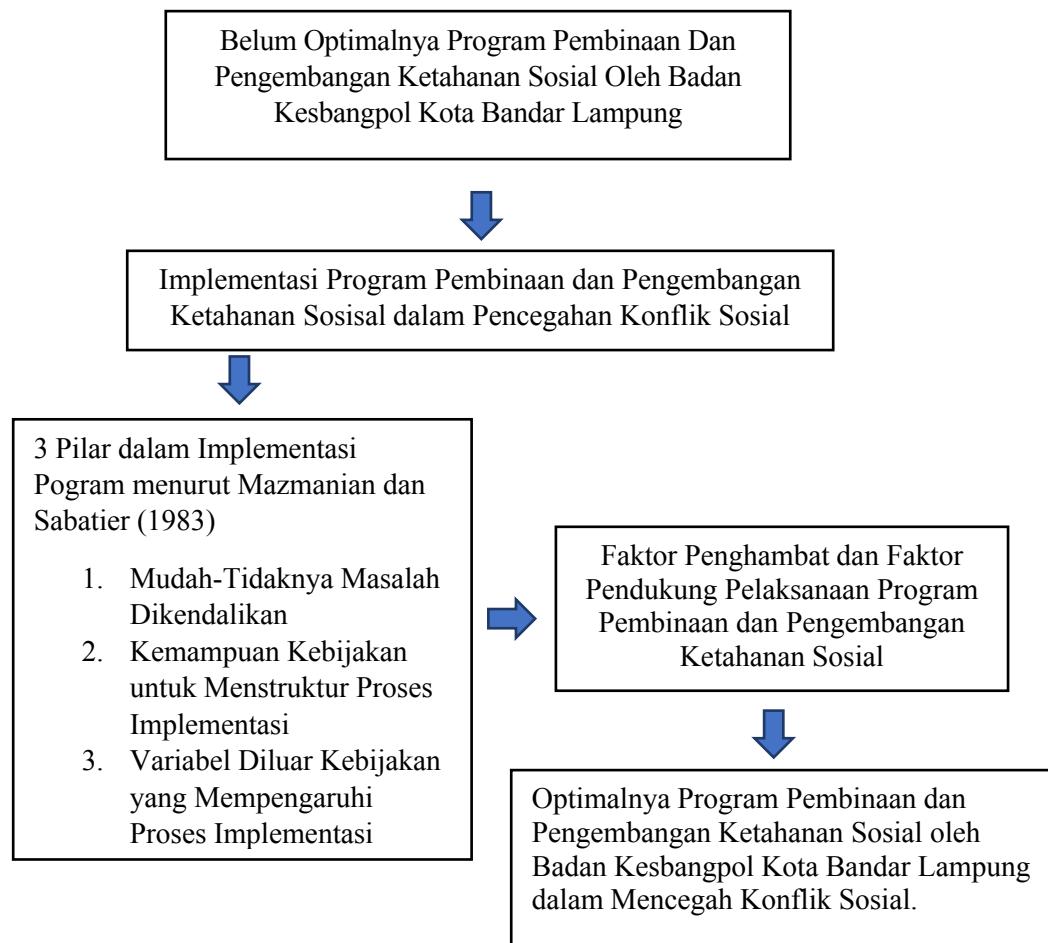
Program ini disusun melalui berbagai strategi seperti pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kohesi sosial di berbagai kelompok masyarakat. Efektivitas program dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti keterlibatan stakeholder, dukungan kebijakan, dan alokasi sumber daya. Diharapkan, program ini mampu mereduksi ketegangan sosial dan mencegah konflik, sehingga tercipta stabilitas sosial di Bandar Lampung. Dengan demikian, Badan Kesbangpol diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi program ini sebagai solusi berkelanjutan atas potensi gangguan terhadap kondusifitas masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah yang dihadapi, karakteristik kebijakan atau program, lingkungan implementasi. Dengan menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini dapat menganalisis beberapa hal kunci, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, penelitian akan menganalisis bagaimana Kesbangpol memahami dan merespons masalah konflik sosial yang ada.
2. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, penelitian akan mengevaluasi apakah tujuan dari program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial sudah jelas dan konsisten di seluruh level pelaksana. Kejelasan ini sangat penting agar pelaksana dapat menerapkan program sesuai dengan arahan yang telah dirumuskan.
3. Variabel-variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Pengaruh lingkungan eksternal pada implementasi

program, lingkungan sosial, dan ekonomi dan teknologi di wilayah implementasi program akan dianalisis. Dapat menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program juga melihat respon masyarakat terhadap program tersebut.

Dengan demikian, Teori Mazmanian dan Sabatier dalam konteks penelitian ini akan digunakan sebagai alat untuk memahami tidak hanya proses implementasi program, tetapi juga faktor hambatan serta pendukung yang mempengaruhi sukses atau tidaknya program pembinaan ketahanan sosial yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam upaya pencegahan konflik sosial. Berikut adalah kerangka pemikiran peneliti terkait dengan implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial oleh badan kesbangpol dalam pencegahan konflik sosial dengan menggunakan teori implementasi dari Mazmanian dan Sabatier (1983) :



**Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial. Guna mengetahui hal tersebut maka peneliti membutuhkan narasumber untuk kemudian dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan data-data yang valid dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

Alasan dari dipilihnya metode ini guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati agar mendapatkan hasil yang baik. Peneliti harus mendapatkan data dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya agar mendapatkan hasil yang komprehensif berkaitan dengan implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan penelitian ini, manusia yang menjadi instrumen penelitian.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan untuk memberi batasan penelitian agar tetap selaras dengan tujuannya dan tidak meluas hingga membahas isu-isu di

luar konteks penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung ini menggunakan teori implementasi program dari Mazmanian dan Sabatier (1983) yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yakni:

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yakni, peneliti menganalisa program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dari tingkat kemudahan atau kesulitan masalah dalam implementasi program, yang mencakup: 1) dukungan teori dan teknologi, 2) keragaman perilaku kelompok sasaran yang diatur, 3) tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi yakni terdiri dari: 1) kejelasan dan konsistensi tujuan yang akan dicapai, 2) dipergunakannya teori kausal, 3) ketetapan alokasi sumber dana, 4) keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana, 5) aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, 6) perekrtutan pejabat pelaksana, 7) keterbukaan kepada pihak luar.
3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yakni terdiri dari: 1) kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, 2) dukungan publik, 3) sikap dan sumberdaya dari konstituen, 4) dukungan pejabat yang lebih tinggi, 5) komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Penggunaan teori Mazmanian dan Sabatier dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang menyeluruh terhadap implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, karena teori ini tidak hanya membahas proses pelaksanaan program saja, tetapi juga mencakup identifikasi berbagai faktor yang

memengaruhi keberhasilannya, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dengan mengkaji karakteristik kebijakan, kondisi eksternal, serta kapasitas lembaga pelaksana, teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh bagaimana program dijalankan dan apa saja yang menjadi tantangan maupun pendukung dalam upaya pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terletak di Gedung Semergo, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan peneliti mengenai beberapa fenomena konflik sosial yang terjadi di Bandar Lampung, yang menunjukkan adanya peningkatan ketegangan antar kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan strategi yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol dalam program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial. Dengan demikian, lokasi ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis efektivitas program tersebut yang diimplementasikan dalam mengatasi konflik sosial di Kota Bandar Lampung.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Acuan pada data terletak pada fakta empiris yang ditemukan hingga dikumpulkan oleh peneliti sebagai tujuan dalam pemecahan masalah atau menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat bersumber dari berbagai macam teknik selama proses penelitian. Berikut adalah beberapa jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

- a. Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini dapat berupa wawancara peneliti dengan informan. Data primer dikumpulkan dari sumber utama. Hal ini dilakukan guna penulis mendapatkan hasil informasi-informasi yang didapatkan guna keperluan penelitian secara langsung,

sumber yang didapatkannya dari para informan tersebut dan juga dari tokoh masyarakat yang berada di Kota Bandar Lampung.

- b. Data Sekunder mengacu pada beberapa sumber data yang dipakai sebagai informasi tambahan, antara lain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, artikel, jurnal, situs resmi pemerintah, dan data lain yang relevan dalam mendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data-data pendukung mengenai implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan dalam setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada tahap ini ada tiga macam pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu:

#### **3.5.1 Wawancara**

Menurut Moleong (2017) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi tentang perspektif, pemikiran, pendapat, dan perasaan partisipan tentang suatu peristiwa, fenomena, realitas atau kenyataan, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada narasumber (Raco, 2018). Berdasarkan hal ini peneliti akan menggali informasi yang berkaitan dengan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan ketahanan sosial.

**Tabel 4. Data Narasumber Yang Terlibat Dalam Penelitian**

No.	Informan	Informasi
1.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	Sebagai Kepala Bidang, informan memiliki pengetahuan yang luas tentang proses koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan program pengimplementasi program dan dampaknya terhadap pencegahan konflik sosial
2.	Staff Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	Data mengenai anggaran serta lembaga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial.
3.	Staff Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Data mengenai wilayah rawan konflik di Bandar Lampung serta penyelesaiannya dari Badan Kesbangpol
4.	Bripka Satuan Intelkam POLRESTA Bandar Lampung	Sebagai instansi/lembaga yang mengetahui lebih dalam terkait potensi konflik di Bandar Lampung
5.	Staff Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung	Sebagai instansi/lembaga yang mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024*

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen aktual seperti arsip, peninggalan tertulis, peraturan perundang-undangan, data terkait biografi, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian. Dokumen terdiri dari tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang bersumber pada UU/Peraturan Pemerintah, artikel jurnal, literatur, data data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan program pembinaan dan pengembangan ketahanan

sosial. Proses pengumpulan referensi atau data pada penelitian ini berasal dari database yang digunakan pada tahun 2021-2024.

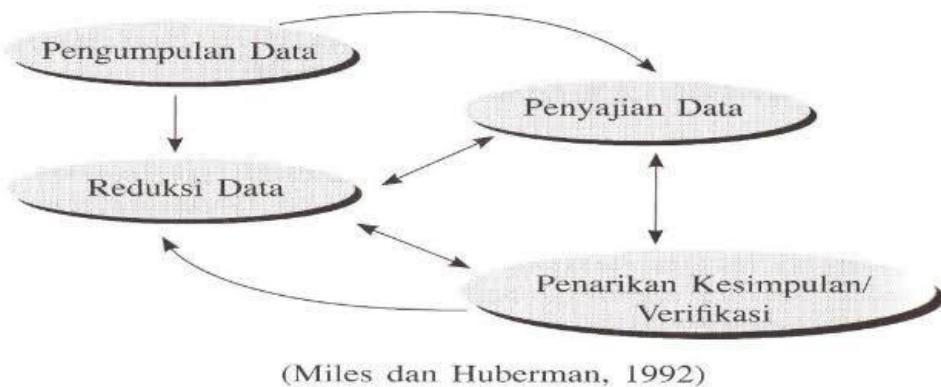
**Tabel 5. Daftar Dokumentasi**

No.	Dokumen	Substansi
1.	Strategi Badan Kesbangpol dalam pencegahan konflik intoleransi pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial	Badan Kesbangpol melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan dampak dari upaya pencegahan konflik.
2.	Buku petunjuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023, Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	Terdapat penjelasan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target, termasuk Capaian Indikator Utama (IKU) yang relevan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3.	Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021	Tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.
4.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012	Tentang penanganan konflik sosial.
5.	Peta Wilayah Potensi Konflik di Bandar Lampung oleh Sat Intelkam POLRESTA Bandar Lampung	Terdapat penjelasan peta serta data yang mencakup wilayah-wilayah dengan potensi gesekan sosial yang tinggi akibat faktor seperti perbedaan etnis, agama, kepentingan politik lokal, serta masalah tanah.
6.	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2025 Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	Berisi tentang indikator program, kegiatan, dan alokasi dana kegiatan.

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada peneliti ini menggunakan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani, *et al*, 2020) analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Proses analisis data meliputi beberapa kegiatan yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) dan penarikan kesimpulan. Analisis data seperti ini diberi nama dengan analisis data. Di bawah ini penjelasan gambar analisis data:



**Gambar 5. Komponen-Komponen Analisis Data**

*Sumber: Miles dan Huberman (1992).*

Analisis data dalam model alir ini dimulai dengan kemunculan data yang berupa deskripsi kata-kata atau rangkaian kata. Selanjutnya, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi data berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian di lokasi. Penting untuk dicatat bahwa reduksi tidak dapat dipisahkan dari analisis; peneliti perlu memilih data mana yang akan dikode dan mana yang sebaiknya diabaikan. Semua cerita yang berkembang merupakan bagian dari pilihan analitis yang diambil.

Selanjutnya, penyajian data menjadi aspek yang sangat krusial dalam analisis ini. Penyajian ini berupa kumpulan informasi yang tersusun rapi, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian lebih banyak mengandalkan format naratif dan berfokus pada penyederhanaan informasi yang kompleks. Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti atau makna dari model pembelajaran yang diteliti.

Pada proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola-pola induktif yang diverifikasi selama proses penelitian. Setelah itu, makna-makna

yang dihasilkan dari data harus diuji untuk memastikan kebenarannya, dan kecocokannya melalui proses pemeriksaan dan pengecekan silang. Menurut Miles dan Huberman, seperti yang dikutip (dalam Hardani, *et al*, 2020), analisis data yang mengikuti model interaktif dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3.6.1 Kondensasi Data**

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data. Dengan demikian, peneliti dapat memfokuskan perhatian pada informasi yang benar-benar dengan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam mencegah konflik oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan peran. Pada penelitian ini penyajian data yang berhubungan dengan implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung telah dijelaskan dengan menggunakan teks naratif dan dapat berbentuk tabel, dan gambar agar mudah memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat dari analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan seperti hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah didapat dari pengambilan data di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan Polresta Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil yang optimal terkait pandangan implementor dan stakeholder terkait program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial.

## 3.7 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Moleong (2017) menyatakan teknik keabsahan data merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keabsahan data yang diperoleh. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data ditentukan oleh terpenuhinya kriteria tertentu:

### 1. *Credibility*

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiри sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari informan yang relevan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kembali data yang diperoleh dari wawancara, kemudian dibandingkan dengan dokumentasi yang ada.

## 2. *Transferability*

Merupakan pemeriksaan transferabilitas data ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mendalam dan seakurat mungkin terkait hasil penelitian, yang menjelaskan konteks di mana penelitian dilakukan. Sederhananya uji transferabilitas ini sejauh mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi atau kondisi lain. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci terkait implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam pencegahan konflik oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung serta faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat implementasi program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam pencegahan konflik oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, guna pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama bisa membandingkan situasi dan mengevaluasi apakah hasil penelitian ini bisa diterapkan di tempat lain atau tidak.

## 3. *Dependability*

Menurut Sugiyono (2018) pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliable* atau *dependable*. Dalam penelitian ini, uji dependabilitas dilakukan dengan penyampaian kebenaran terkait kegiatan selama proses penelitian tentang program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh dosen pembimbing dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

#### 4. *Confirmability*

Merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian akademis. Penelitian dianggap memiliki sifat objektif ketika hasilnya telah diterima oleh sejumlah besar individu. Uji *Confirmability* setara dengan Uji *Dependabilitif*, sehingga memungkinkan penerapannya secara bersamaan. Proses pengujian *confirmability* dilakukan sepanjang penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini uji konfirmabilitas dilakukan dengan mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing serta dosen penguji terkait dengan Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam pencegahan konflik oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, beserta faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dalam pencegahan konflik di Kota Bandar Lampung.

## **V. KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan mengenai implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial dalam pencegahan konflik sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, kesimpulan akhir pada penelitian ini merujuk pada dua rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial.

Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai landasan hukum. Program ini telah mampu mendorong masyarakat menyikapi potensi konflik lebih tenang melalui mediasi, pelibatan tokoh agama serta sinergi lintas instansi seperti FKUB dan Pihak Kepolisian. Namun mekanisme komunikasi dua arah yang difasilitasi Badan Kesbangpol belum sepenuhnya efektif pada kasus Tugu Pagoda di Teluk Betung Kota Bandar Lampung, menunjukkan perubahan perilaku masyarakat belum optimal.

## 2. Faktor Pendukung Implementasi Program, meliputi:

- 1) Komitmen tinggi pejabat pelaksana dan kerjasama instansi (Kesbangpol, Kepolisian, FKUB) yang rutin melakukan sosialisasi, mediasi, dan deteksi dini potensi konflik.
- 2) Dukungan masyarakat yang relatif kuat serta kesadaran akan manfaat program dalam menjaga keharmonisan sosial.
- 3) Pemanfaatan data wilayah rawan konflik untuk intervensi tepat sasaran.
- 4) Adaptasi terhadap tantangan sosial seperti penyebaran hoaks melalui media sosial.

Faktor-faktor pendukung ini menjadikan implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial mampu meredam beberapa potensi konflik, meskipun belum mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah faktor penghambat implementasi program yaitu sebagai berikut:

## Faktor Penghambat Implementasi Program, meliputi:

- 1) Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) formal sehingga konsistensi dan efisiensi kegiatan belum terjamin.
- 2) Koordinasi hirarki antar-lembaga pelaksana belum optimal, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran dan melemahkan efektivitas pencegahan konflik.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu Implementasi program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi komunikasi, dan sinergi kelembagaan. Program ini mendorong perubahan perilaku masyarakat meskipun belum optimal. Selanjutnya, faktor pendukung implementasi program meliputi komitmen pejabat dan aparat, dukungan masyarakat, pemanfaatan data

potensi konflik, serta adaptasi terhadap tantangan sosial. Sedangkan faktor penghambat mencakup ketimpangan alokasi anggaran, ketiadaan SOP formal, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian ini, ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk optimalisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial di masa mendatang:

1. Menyusun dan mengimplementasikan SOP formal.  
Standar Operasional Prosedur diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih konsisten, efisien, dan terukur di setiap kegiatan.
2. Optimalisasi alokasi anggaran.  
Pemerintah daerah perlu memperbaiki mekanisme penyerapan anggaran dengan fokus pada kegiatan inti seperti koordinasi, pembinaan lapangan, dan pelaksanaan kebijakan, bukan hanya pada monitoring dan evaluasi.
3. Penguatan koordinasi antar-lembaga.  
Diperlukan forum tetap yang mengikat untuk memperkuat sinergi lintas instansi (Kesbangpol, Polri, FKUB) sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau celah dalam pencegahan konflik.
4. Pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal.  
Penggunaan media sosial dapat diperluas tidak hanya untuk sosialisasi, tetapi juga sebagai sarana deteksi dini potensi konflik melalui pemantauan isu-isu yang berkembang di masyarakat.
5. Peningkatan Literasi Sosial dan Digital Masyarakat, agar masyarakat mampu memahami informasi yang benar dan membangun kepercayaan terhadap program-program pemerintah. Upaya ini

termasuk edukasi tentang bahaya hoaks, penyebaran berita palsu, serta penggunaan media sosial secara positif.

6. Perluasan Program dan Penyesuaian dengan Kebutuhan masyarakat. Program perlu diperluas dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal di berbagai wilayah, khususnya kawasan yang masih tertinggal dari segi sosial ekonomi dan teknologi. Pendekatan yang contextual dan inovatif akan meningkatkan keberhasilan program dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut diharapkan program pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, dan tahan terhadap berbagai potensi konflik sosial di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. (2024). Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Sekolah Menengah Atas Di Provinsi Lampung.
- Agung, M. F. M. (2025). Strategi *Collaborative Governance* dalam Reformasi Pelayanan Publik. *The Indonesian Journal of Public Administration* (IJPA), 11(1), 18-26.
- Andries, B. F., & Yuniar, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program 100-0-100 di Jakarta Guna Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan). *Jurnal Lemhannas RI*, 9(2), 48-72.
- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361-368.
- Ayinun, A., Malik, I., & Haerana, H. (2023). Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 4(1), 81-95.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Diambil dari <https://bakesbangpol.bandarlampungkota.go.id/dokumen.html> (diakses pada 1 Oktober 2024)
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Statistik Ketahanan Sosial Hasil Susenas Modul Hansos 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022.
- Bercovitch, J., & Jackson, R. D. W. (2009). *Conflict resolution in the twenty-first century: principles, methods, and approaches*. University of Michigan Press.
- Budi, I. (2023). Analisis Media Sosial Sebagai Upaya Dini Deteksi Potensi Konflik Masyarakat di Dunia Maya.

- Cacioppo, J. T., Reis, H. T., & Zautra, A. J. (2011). *Social Resilience: The Value of Social Fitness With an Application to the Military*. American Psychologist, 66(1).
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar analisis kebijakan publik.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, Inc.
- Eyestone, R. (1971). *The Threads of Policy: A Study in Police Leadership*. Indianapolis: Bobs Merrill.
- Eviany, E. (2019). Kiat Mencegah Konflik.
- Fatkuroji, F. (2017). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. Tarbawi: *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 28-40.
- Galtung, J. (2018). Perdamaian Dengan Mengubah Konflik Secara Damai- Pendekatan Transcend. Handbook Studi Perdamaian dan Konflik, 22.
- Kecamatan Mariso - Kota Makasar). *Social Welfare Research and Development Agency, Indonesian Ministry of Social Affairs*.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Handrisal, H., & Afrizal, A., (2019). Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ekang Anculai Kabupaten bintan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(1), 627-641.
- Hardjana, A. M. (2001). *Training SDM yang efektif*. Kanisius.
- Hardani, H., Sukmana, D. J., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hakim, A., Badjo, A., Wibowo, A. H. M., Afin, A. S., Ricnaldi, R., Putra, R. R., & Afryadi, A. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1033-1042.
- Hildawati. (2024). Digital Publik Relation KEMENSOS dalam Pemanfaatan Sosial Media. Dawatuna: *Journal of Communication and Islamic Broadcasting*. Volume 4 Nomor 5 (2024) 1825 – 1838.
- Jatnika, D. C., Adiansah, W., & Jatnika, D. D. (2025). Teknologi Digital Dalam Upaya Mediasi Konflik Sosial: Kajian Literatur Naratif. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 7(1), 1-8.
- Jatnika, D. C., Humaedi, S., & Firsanty, F. P. (2024). Program Pemerintah Dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Untuk Optimalisasi Keberfungsi Sosial. Focus: *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7 (2), 237–249.

- Jeddawi, M. (2025). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat (*Doctoral dissertation*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Kupastuntas.co. (2023). Soal Kasus Intoleransi di Bandar Lampung, Ketua DPRD Nilai Pemkot Tidak Tegas dan Selalu ‘Menghilang’. Diambil dari <https://kupastuntas.co/2023/09/18/soal-kasus-intoleransi-di-bandar-lampung-ketua-dprd-nilai-pemkot-tidak-tegas-dan-selalu-menghilang> (Diakses pada 1 Oktober 2024).
- Kurniawan, D. & Syani, A. 2014. Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), pp. 1-12.
- Kwok, A. H., Doyle, E. E., Becker, J., Johnston, D., & Paton, D. (2016). *What is ‘social resilience’? Perspectives of disaster researchers, emergency management practitioners, and policymakers in New Zealand*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 19, 197-211.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (2024). From [bakesbangpol.bandarlampungkota.go.id:https://bakesbangpol.bandarlampungkota.go.id/dokumen/176LAKIP%20BADAN%20KESBANGPOL%202022.pdf](https://bakesbangpol.bandarlampungkota.go.id/dokumen/176LAKIP%20BADAN%20KESBANGPOL%202022.pdf).
- Larasasti, S., Sari, P., Ramadhani, S., & Maisyarah, R. (2025). *Analysis of The Influence of Corporate Governance and Financial Performance on Firm Value*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(4), 8-8.
- Makhmudah, K. (2015). Pencegahan konflik melalui local wisdom (Studi model conflict prevention di Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mangkunegara, A. A. P. (2011). Manajemen sumber daya manusia perusahaan.
- Maranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Universitas Brawijaya.
- Mardiyah, M., Vian, S., Herawati., Achmad, M.T. (2025). Optimalisasi Indikator Program dalam Manajemen Strategi Pendidikan : Evaluasi, Implementasi, dan Dampaknya. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 5(2), 102–120. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v5i2.5169>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik.
- Moeloeng, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Kualitalif Sasial.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.

- Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Peranan Penggunaan Media Sosial Untuk Meminimalisasi Konflik Isu Sara Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 127-136.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik.
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi sebuah program berbasis riset aksi dalam meningkatkan kualitas program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 38-46.
- Putri, I. N. (2021). Pengaruh Konflik Dan Analisa Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kalerindo Semesta Abadi Medan.
- Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Septiyani, E. E. (2013). Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013. Skripsi. Strata I Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
- Setara institute. (2024). Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023. Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru. [https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023\\_Setara-Institute\\_Ind.pdf](https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf) (Diakses pada 25 Mei 2025).
- Setyanto, E., Sulhan, M., Nurranto, H., & Kemal, I. (2022). Manajemen Organisasi dan Jaringan Sistem Pendidikan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(6), 523-533.
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 43-55.
- Sugiyono. (2018). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2019. Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis. Prenadamedia Group.
- Swantrom N. Dkk (2005), Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management, and Beyonce a Conceptual Exploration. Swedia: Upspsala Pers
- Syahida, Bayu, Agung. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Jurnal Umrah*. Vol 7, No 14. hlm 8 & 13.
- Tjilen, A.P. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media.
- Tadioeddin, Z. M., & Chowdhury, A. (2009). Socioeconomic perspectives on violent conflict in Indonesia. *The Economics of Peace and Security Journal*, 4(1).

- Wahyuni, S. (2018). Konflik Masyarakat Nelayan Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (*Doctoral Dissertation*, Universitas Negeri Makassar).
- Wijono, S. (2012). Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., & Hasan, H. (2024). Indeks Kota Toleran Tahun 2023. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. Setara *Institute*.
- Aditama, R. (2020). Kepemimpinan Birokrasi dalam Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 123-135.
- Anwar, S., & Hidayat, A. (2023). Collaborative Governance in Addressing Social Issues: A Case Study in Local Government. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 450-465.
- Dewi, S., & Putra, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Strategi Menjaga Netralitas. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(1), 56-70.
- Howard, P. N., & Nissenbaum, M. (2020). Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Influence on Social Media. Oxford University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Scott, Foresman and Company.
- Mahayani, N. M. H. (2024). Implementasi Kebijakan Sosial di Masyarakat Marginal: Studi Literatur Tentang Hambatan dan Strategi Adaptasi. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), 181-188.
- Nofrianti, Y., Syamsir, S., Amanda, N., Salsabila, T., Alghiffari, H., Yudanur, R. M. Z., & Syahputra, M. A. (2024). Konflik Dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(7), 161-171.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference* (Volume 14, Nomor 1 Halaman 224 - 228)
- Nugroho, A., & Lestari, D. (2024). Multi-Stakeholder Collaboration in Complex Policy Implementation: A Case Study of Social Conflict Prevention. *Journal of Public Policy and Governance*, 8(1), 1-15.
- Prasetyo, B. (2018). Kapasitas Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-58.

- Pratama, R., & Lestari, S. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Hoaks dan Literasi Digital untuk Stabilitas Sosial. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 34-48.
- Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114-127.
- Putra, A., & Sari, D. (2021). Implementasi Kebijakan di Daerah Multikultural: Studi Kasus Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(3), 289-304.
- Putra, B., & Wijaya, C. (2024). Komitmen Pemimpin Operasional dalam Implementasi Kebijakan di Tengah Keterbatasan Sumber Daya. *Jurnal Manajemen Publik*, 15(1), 78-92.
- Rahman, F., & Dewi, S. (2024). Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 112-125.
- Rahman, M., & Hidayat, A. (2022). Network Governance in Public Service Delivery: A Case Study in Diverse Communities. *International Journal of Public Administration*, 45(8), 701-715.
- Rhodes, R. A. W. (2016). Understanding Governance: Ten Years On. *Public Management Review*, 18(1), 1-17.
- Santoso, B., & Putra, D. (2023). Persepsi Masyarakat dan Dukungan Terhadap Program Pemerintah: Studi Kasus Program Ketahanan Sosial. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 145-160.
- Sari, R., & Wijaya, H. (2024). Fleksibilitas Kemitraan dalam Implementasi Kebijakan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 23-38.
- Setiawan, A., & Budi, S. (2023). Analisis Inkonsistensi Implementasi Kebijakan Publik Akibat Ketiadaan Standar Operasional Prosedur. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 89-104.
- Sihono, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 210-222.
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 43-55.
- Smith, J., & Jones, K. (2019). Agrarian Conflicts and Religious Tensions in Indonesia: A Socio-Legal Perspective. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 187-205.

- Supriyanto, B., & Wibowo, S. (2022). Community-Based Conflict Resolution: The Role of Religious and Traditional Leaders. *Journal of Peacebuilding & Development*, 17(1), 78-92.
- Suryadi, H. (2021). Efektivitas Anggaran Program Pemerintah Daerah: Studi Kasus Sektor Sosial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 167-180.
- Sulaiman, A. I. (2013). Model Komunikasi Formal dan Informal dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2).
- Syahida, Agung, Bayu. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat.)
- Syarien, M. I. A., & Samarah, G. (2023). *Interagency Coordination Drivers, Instruments, and Success Factors: A Systematic Literature Review*. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 301-318.
- Thahir, M. (2023). Tantangan dan strategi dalam mengatasi perbedaan budaya dan agama di Indonesia. Dakwatun: *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 132-143.
- Wibisono, A., & Putra, R. (2023). Efisiensi Anggaran Sektor Publik: Studi Kasus Alokasi Dana Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(1), 45-60.
- Wibowo, A., & Santoso, R. (2020). *Collaborative Governance in Disaster Management: A Case Study of Inter-Organizational Partnerships*. *Journal of Public Policy*, 12(4), 345-360.
- Wibowo, D., & Sari, M. (2023). Pentingnya Pemetaan Konflik Berbasis Data untuk Intervensi Kebijakan yang Efektif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(1), 1-15.
- Widodo, S. (2019). Manajemen Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Gadjah Mada University Press.
- Widodo, F. L., & Astuti, R. S. (2024). Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(3), 215-228.
- Wijaya, H., & Sari, R. (2022). Keterbatasan Sumber Daya dan Efektivitas Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 14(2), 101-115.
- Wijaya, S., & Susanto, T. (2022). Kebutuhan Spesialisasi dan Pelatihan dalam Implementasi Program Pemerintah. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10(1), 23-38.

- Wulandari, A., & Santoso, B. (2024). Peningkatan Kohesi Sosial Melalui Program Dialog dan Edukasi di Masyarakat Majemuk. *Jurnal Studi Perdamaian dan Konflik*, 9(1), 45-60.
- Yanti, A., Asna, A., Rustam, T., Danial, I., Pebriyanto, A. H., & Putri, W. (2025). Buku Referensi Kemandirian Fiskal Daerah Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Sebagai Solusi.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: Kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2 (1), 157–183.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 5(1), 256-271.